

PERAN PEMERINTAH DESA  
DALAM MENSEJAHTERAKAN  
MASYARAKAT MELALUI  
PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR (Studi Desa  
Sumberbrantas Kecamatan  
Bumiaji, Kota Batu)

*by Ignasius Milla*

---

**Submission date:** 12-Dec-2020 12:42PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1472925133

**File name:** ASYARAKAT\_MELALUI\_PEMBANGUNAN\_INFRASTRUKTUR\_-\_adi\_putra.docx.pdf (91.48K)

**Word count:** 881

**Character count:** 6256

**8**  
**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENSEJAHTERAKAN  
MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

**(Studi Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)**

**SKRIPSI**



Oleh

IGNASIUS MILLA  
2016210073

KOMPOTENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
**4**  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI  
MALANG

2020

### Ringkasan

Desa adalah garda utama pada suatu pemerintahan dalam mencapai suatu tujuan dari semua urusan-urusan yang menjadi rencana dari pemerintahan. Maka pada era globalisasi saat ini pembangunan adalah hal utama bagi negara maju dan negara berkembang demi mencapai suatu pembangunan nasional menuju kesejahteraan yang diinginkan agar dapat sesuai pada suatu visi -misi pembangunan nasional. Di mana desa juga adalah satu kesatuan hukum yang mempunyai wewenang untuk mengelola serta mengurus urusan pemerintahan agar bisa mencapai suatu kepentingan masyarakat setempat.

Kata Kunci : Pembangunan, Kebijakan Pembangunan, Desa

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Desa secara formal diakui pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa. pada undang-undang mempunyai arti sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memiliki batas-batas tertentu dan mengelola kebudayaan setempat pada sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia bahwa menempatkannya sebagai suatu organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengurus dan mengatur kelompoknya sendiri. Pemerintah daerah memiliki hak dalam pengembangan agar dapat sesuai dengan hak-hak kolektif desa (Lai dan Bosin, 2016:124) pada kedudukannya desa adalah salah satu organisasi mempunyai peran penting untuk keberhasilan pemerintahan nasional.

Desa merupakan pokok utama untuk mencapai kesuksesan dari semua urusan serta rencana pada pemerintahan. Maka menjadi pokok pembangunan desa merupakan tujuan utama keberhasilan pembangunan nasional dalam melakukan tugasnya mengelola dan mengurus kelompoknya, memiliki:

1. Tugas kabupaten/kota kewenangannya diberikan pengaturannya terhadap instansi;

2. Tugas diberikan terhadap pemerintah desa tercantum pada peraturan undang-undang.

Pendanaan bersumber dari pemerintah daerah terdiri 3 komponen unsur utama, yaitu: pendapatan asli daerah mencakup: kontribusi pemerintah, maupun sumbangan-sumbangan yang terdapat pada peraturan Undang – Undang, disamping dapat diimplementasikan pada daerah. Sehingga proyek pemerintah pusat diimplementasikan pada daerah pendanaannya melalui APBN tersebut termasuk anggaran pemerintah daerah (Suseno, 2013:345) sebagai konsekuensi adanya tuntutan serta tugas pada cukupnya sumber dana yang tersedia. Wasistiono (2006:107) keuangan adalah faktor esensial program pendapatan yang menyatakan sama hal dengan mengatur serta guna mendukung bentuk pelaksanaan kewenangan. Pada operasionalisasinya mewujudkan otonomi diberikan kepada desa sumber pendanaan-pendanaan mempunyai hubungan bahwa seluruh pembangunan yang dilaksanakan bertujuan meningkatkan kemakmuran masyarakat desa salah satunya peran pemerintah sangat penting dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Era globalisasi dan modernisasi pembangunan merupakan hal utama untuk pemerintah dalam menunjang keberhasilan nasional. Oleh karena itu, keberhasilan sebuah negara tidaklah ditentukan dapat ditentukan dari kekayaan sumber daya alam, dapat diamati bahwa keberhasilan sebuah negara dapat ditentukan oleh perencanaan pembangunan yang baik, (Sandro, 2016, Jisip : Vol. 5, No. 3). Kesuksesan pembangunan pada suatu negara merupakan tolak ukur bagi bangsa dalam mensejahterakan rakyatnya dalam hal ini pembangunan fisik berupa fasilitas publik, kesejahteraan.

Pemberlakuan undang-undang memiliki implikasi kepada pelaksanaan pembangunan yang terbuka berdasarkan pemberdayaan terhadap semua elemen-elemen masyarakat dan tata pemerintah yang baik. Pada pelaksanaan otonomi daerah yang dapat direncanakan dapat berjalan sesuai dengan pemberian otonomi daerah tertentu menjadi tolak ukur utama bagi sistem pemerintahan kabupaten/kota yang telah memberikan kewenangan seluas-luasnya terhadap pemerintah Kabupaten/Kota mengurus dan mengatur kehidupan masyarakatnya di berbagai bidang sesuai dengan regulasi yang sedang berlaku. Hal ini disebabkan adanya sebagian tugas pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan disertakan adanya pendanaan dalam meningkatkan kemakmuran seluruh lapisan masyarakat pada umumnya (Nurman 2015:247).

Visi misi kemudian dituangkan pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan sebagai bentuk implementasi dari sebuah visi dan misi yang bertugas menyusun dokumen di kota batu adalah bappelitbangda sebagai pusat penghimbau dapat membantu pelaksana teknis yaitu skpd dan tim ahli.

Perencanaan adalah suatu usaha untuk mencapai kemakmuran lebih mengutamakan kebutuhan dari warga masyarakat yang ada di kota batu. Pemerintah memiliki tugas dan fungsi yang amat penting untuk menentukan rencana apa saja yang kedepannya bisa membuat sebuah perubahan pada bidang pembangunan di segala bidang baik infrastruktur, pariwisata, pertanian dan bidang lainnya yang mampu memiliki implikasi baik terhadap kesejahteraan masyarakatnya diharapkan agar pelaksanaan pembangunan lebih memperhatikan aspek kepentingan masyarakat agar yang telah direncanakan pada implementasinya benar-benar bermanfaat. peneliti tertarik meneliti “Peran

Pemerintah Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pembangunan Infrastruktur”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran dari pemerintah desa sumberbrantas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Apakah dengan dibangunnya infrastruktur akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
3. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur di desa sumber brantas, kecamatan bumiaji, kota batu.

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa sumber brantas, kecamatan bumiaji, kota batu.
2. Untuk mengetahui apakah kesejahteraan masyarakat akan meningkat dengan adanya infrastruktur yang baik.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung kesejahteraan masyarakat akan meningkat dengan adanya infrastruktur yang baik.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap mampu memberikan kontribusi, manfaat baik secara akademis dan teoritis.

1. Manfaat akademis

Dapat menambah wawasan informasi tentang bagaimana pentingnya peranan pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

2. Manfaat teoritis

- a. Untuk peneliti sendiri

Peneliti mengharapkan Dapat mampu memberikan manfaat dan pengetahuan tentang peran pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

- b. Bagi Pemerintah Desa Sumberbrantas

Masukan untuk pemerintah dapat mengevaluasi kinerja pada bidang pembangunan dan memberikan masukan kepada pemerintah desa bahwa pembangunan infrastruktur yang baik sangat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya.



# PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (Studi Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)

## ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://apeatmaja.wordpress.com">apeatmaja.wordpress.com</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://publikasi.unitri.ac.id">publikasi.unitri.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	1%

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off